

ANALISIS CAPACITY DEVELOPMENT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA DESA YANG BERKELANJUTAN

Adha Fabryan Cahya Bintang¹⁾, Aprilla Agatha Arlyansyah²⁾, Shelin Bella Destiana³⁾

^{1),2),3)}**Universitas Airlangga**

Email : adha.fabryan.cahya-2023@fisip.unair.ac.id¹⁾, aprilla.agatha.arlyansyah-2023@fisip.unair.ac.id²⁾, shelin.bella.destiana-2023@fisip.unair.ac.id³⁾

Abstract: *Indonesia has more than 10,800 tourist villages that hold great potential for sustainable development in the tourism sector. Tourist villages play an important role in improving the local economy, preserving culture, and preserving the environment. However, the reality on the ground shows that many villages have not been able to manage this potential optimally due to limited human resources, management, and community participation. There are still many tourist villages that have not been able to manage this potential optimally. Therefore, the Capacity Development approach is a strategic solution to build the capacity of individuals, organizations, and communities to manage tourism independently and sustainably. This approach emphasizes the importance of strengthening the capacity to act, lead, and relate, as well as the integration of local social, cultural, and institutional values. By applying the principles of UNDP and OECD, tourist villages are expected to develop not only in terms of infrastructure, but also in terms of social resilience, institutions, and authentic local identity.*

Keywords: *Sustainable Tourism Villages, Capacity Development, Local Economic Development.*

Abstrak: Indonesia memiliki lebih dari 10.800 desa wisata yang menyimpan potensi besar dalam pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Desa wisata berperan penting dalam meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa belum mampu mengelola potensi ini secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, manajemen, dan partisipasi masyarakat. Masih banyak desa wisata yang belum mampu mengelola potensi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan Capacity Development menjadi solusi strategis untuk membangun kemampuan individu, organisasi, dan masyarakat dalam mengelola pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas untuk bertindak, memimpin, dan menjalin relasi (capacity to act, to lead, and to relate), serta integrasi nilai-nilai sosial, budaya, dan kelembagaan lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari UNDP dan OECD, desa wisata diharapkan dapat berkembang tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi daya tahan sosial, kelembagaan, dan identitas lokal yang autentik.

Kata Kunci: Desa Wisata Berkelanjutan, Capacity Development, Pembangunan Ekonomi Lokal.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Statistik Potensi Desa Indonesia 2024 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tercatat Indonesia memiliki 10.807 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu elemen kunci dari inisiatif pengembangan pariwisata lokal, desa wisata memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan, budaya, dan ekonomi. Mengingat pertumbuhan industri pariwisata yang sangat pesat, desa-desa wisata ini memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dengan secara langsung meningkatkan ekonomi lokal dan melindungi lingkungan serta nilai-nilai tradisional.

Namun, dengan banyaknya desa wisata yang tercatat, banyak masyarakat masih kesulitan memanfaatkan potensi wisata mereka. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kemampuan manajemen yang terbatas, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan desa wisata adalah beberapa dari masalah-masalah ini. Sangat penting untuk membangun kemampuan masyarakat desa untuk mengawasi dan memanfaatkan potensi desa wisata agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif sebesar mungkin bagi semua pemangku kepentingan. Desa-desa di Indonesia memiliki dinamika kelembagaan yang unik dalam inovasi pelayanan publik. Pengaturan kelembagaan ini menempatkan desa sebagai tempat inovasi layanan publik di persimpangan tatanan normatif yang saling bersaing. (Setijaningrum et al., 2025). Pernyataan ini memperkuat pentingnya peran kelembagaan desa dalam menyelenggarakan layanan publik, termasuk di dalamnya sektor pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Osborne terkait penyediaan layanan publik, yang didefinisikan sebagai penyediaan layanan esensial secara sistematis oleh entitas pemerintah kepada warga negara, melibatkan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan faktor sosial-politik (Wardiyanto et al., 2025).

Seperti halnya Desa Wisata Dieng di Jawa Tengah. Desa tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pariwisata. Meskipun desa ini memiliki banyak potensi alam yang luar biasa, seperti pemandangan gunung berapi dan situs bersejarah, desa ini menghadapi tantangan dalam mengelola jumlah pengunjung yang terus meningkat. Masyarakat setempat

kurang mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan dan pemasaran pariwisata, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial. Banyak masalah yang perlu segera ditangani, seperti penumpukan sampah dan kerusakan ekosistem. Sebaliknya, Desa Wisata Pentingsari di Yogyakarta merupakan contoh yang baik dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT). Desa ini telah berhasil mengintegrasikan potensi alam dan budaya lokal dengan partisipasi aktif masyarakat melalui program-program seperti homestay berbasis budaya, pelatihan keterampilan, dan atraksi seni tradisional seperti gamelan dan wayang suket. Keberhasilan ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Meskipun Capacity Development (pengembangan kapasitas) merupakan pendekatan yang relatif baru dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini telah terbukti memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di banyak negara berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) Capacity Development adalah proses yang melibatkan penguatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk mengelola dan mengatasi tantangan pembangunan. Pendekatan ini mencakup tiga elemen penting, yaitu *capacity to act*, *capacity to lead*, dan *capacity to relate*, yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola pariwisata secara efektif (UNDP, 2008). Dalam hal ini desa wisata tidak hanya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga pengelolaan yang profesional, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai sosial setempat.

Teori Capacity Development lahir dari kesadaran bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya membutuhkan pemberian bantuan keuangan atau fisik, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada. Pengembangan kapasitas memiliki dampak yang lebih besar dari sekedar peningkatan ekonomi jangka pendek bagi masyarakat desa. Salah satu alasan penting mengapa pendekatan ini sangat relevan untuk sektor pariwisata desa adalah karena potensi pariwisata desa yang sangat besar seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Tanpa kapasitas yang memadai, masyarakat desa akan kesulitan untuk mengelola aspek-aspek penting dalam sektor pariwisata, seperti pengelolaan lingkungan, layanan pariwisata, pemasaran, dan wisata.

Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) bahwa pengembangan kapasitas ini harus melibatkan empat dimensi utama, yakni kapasitas kelembagaan, kapasitas manusia, kapasitas sosial, dan

lingkungan yang memungkinkan untuk mendukung pengembangan tersebut (OECD, 2006). Dimensi-dimensi ini saling berhubungan dalam menciptakan sistem pembangunan yang dapat bertahan lama.

Ketika pengembangan kapasitas berhasil memberdayakan masyarakat desa, hal ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai contoh, *capacity to act* di tingkat individu dan kelompok memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif dalam pengelolaan desa wisata, seperti perencanaan dan pengelolaan kegiatan pariwisata berbasis lingkungan. Hal ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Morgan (2006), yang menekankan bahwa pengembangan kapasitas harus mencakup peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat (Morgan, 2006).

Dari sisi sosial, masyarakat desa akan belajar lebih banyak tentang pentingnya melestarikan budaya dan tradisi lokal, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka karena mereka akan merasa lebih bangga dan terlibat dalam menjaga warisan budaya mereka. Pendekatan ini selaras dengan yang diterapkan oleh Brown, Filer, dan Milne (2000), yang menyarankan bahwa *Capacity Development* bukan hanya sekadar peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pengembangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari desa wisata. Hal ini sangat relevan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya lokal.

Sebagaimana disarankan oleh World Bank (2005), pengembangan kapasitas harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, dan tidak hanya terbatas pada peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan kapasitas tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan dalam mengelola pariwisata, tetapi juga dalam memperkuat kapasitas sosial yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan sektor swasta (World Bank, 2005).

Pendekatan ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk lebih memahami pentingnya keberlanjutan dalam pariwisata. Dengan kapasitas yang terbangun, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa. Seperti yang

dijelaskan oleh Austin (2003), pengembangan kapasitas yang melibatkan kerjasama antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan memperkuat daya saing desa wisata dan memastikan pengelolaan yang lebih adil dan merata (Austin, 2003).

Pengembangan kapasitas merupakan kunci utama untuk memastikan keberlanjutan pariwisata desa. Mengutip pandangan OECD (2006), keberlanjutan pariwisata desa sangat bergantung pada adanya kapasitas kelembagaan yang kuat, yang mendukung implementasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas tidak hanya mencakup pelatihan keterampilan, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosial yang memungkinkan desa wisata untuk berfungsi secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Capacity Development dapat menciptakan solusi yang lebih terintegrasi dan efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh desa wisata di Indonesia.

Kerangka Teoritik

A. Capacity Development

1. Pengertian Capacity Development

Capacity Development (pengembangan kapasitas) adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2009), pengembangan kapasitas mencakup tiga tingkatan: individu (peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap), organisasi (penguatan struktur, sistem, dan kepemimpinan), serta masyarakat (peningkatan partisipasi, kolaborasi, dan kelembagaan lokal).

Dalam konteks pariwisata desa, capacity development bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi wisata secara mandiri. Proses ini tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga pembangunan kesadaran kolektif dan kelembagaan yang kuat. Potter & Brough (2004) menekankan bahwa pengembangan kapasitas harus bersifat holistik menggabungkan aspek teknis, manajerial, dan nilai-nilai lokal agar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

2. Komponen Capacity Development

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2006), pengembangan kapasitas mencakup empat komponen utama. Pertama, peningkatan sumber

daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, seperti manajemen pariwisata, pemanduan, dan pengelolaan homestay. Freire (1970) menyatakan bahwa pendidikan memberdayakan masyarakat dengan mengubah pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian. Kedua, penguatan kelembagaan seperti pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan regulasi desa wisata, sebagaimana dijelaskan North (1990), dapat mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi tata kelola. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan sistem pemesanan online yang menurut (Castells, 2010) mampu memperluas akses pasar global. Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan wisata menjadi kunci keberlanjutan, sebagaimana ditekankan Chambers (1997) dalam pendekatan pembangunan berbasis lokal.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas komunitas untuk mengontrol sumber daya, mengambil keputusan, dan mendorong perubahan sosial-ekonomi (World Bank, 2002). Dalam konteks desa wisata, pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama: ekonomi (melalui usaha homestay, kuliner, dan kerajinan), sosial-budaya (melestarikan tradisi lokal), dan lingkungan (pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan). Ife (2016) menekankan pentingnya pendekatan bottom-up, di mana masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, sehingga program pariwisata lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Dalam konteks pariwisata, Scheyvens (1999, p. 245) mengembangkan kerangka pemberdayaan yang mencakup empat dimensi: ekonomi, psikologis, sosial, dan politik. Model ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat agar mereka memperoleh manfaat secara menyeluruh dari kegiatan wisata. Sofield (2003, p. 114) juga menekankan bahwa pemberdayaan melalui pariwisata harus menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian budaya demi keberlanjutan jangka panjang.

2. Strategi Pemberdayaan

Arnstein (1969, p. 217) dalam artikel klasik "A Ladder of Citizen Participation" mengembangkan teori delapan tangga partisipasi yang menjadi dasar berbagai strategi pemberdayaan. Dalam konteks desa wisata, strategi pemberdayaan yang efektif harus mencakup pembangunan kapasitas lokal. Pretty (1995) menekankan pentingnya pendekatan

participatory learning and action (PLA) dalam pemberdayaan masyarakat. Korten (1980, p. 92) dalam "Community Organization and Rural Development" menambahkan bahwa pembangunan kapasitas harus dimulai dari identifikasi kebutuhan dan potensi lokal, sehingga masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penguatan ekonomi lokal dan kelembagaan juga menjadi elemen penting dalam pemberdayaan desa wisata. Yunus (2007, p. 56) dalam "Creating a World Without Poverty" menjelaskan bagaimana model bisnis sosial dapat memberdayakan masyarakat miskin. Dalam pariwisata desa, penguatan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan homestay, usaha kuliner lokal, dan kerajinan tangan yang dikelola oleh masyarakat. Di sisi lain, Ostrom (1990) menunjukkan bahwa kelembagaan lokal yang kuat dapat mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dikelola secara profesional menjadi kunci keberhasilan pengelolaan desa wisata.

C. Desa Wisata

1. Desa Wisata

Berdasarkan peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010, Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sementara menurut Joshi (2012) dalam Antara (2015), desa Wisata (rural tourism) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur - unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.

Menurut Yoeti (1996), desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus sebagai tujuan wisata, seperti tradisi dan budaya yang masih asli, makanan khas, sistem pertanian dan sosial yang unik, serta lingkungan alam yang terjaga. Faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik utama sebuah desa wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2021) memetakan desa wisata ke dalam empat tingkatan. Pertama, Desa Wisata Rintisan, yaitu desa yang masih berupa potensi tanpa produk wisata dan minim kunjungan serta sarana-prasarana, dengan kesadaran masyarakat yang belum terbentuk. Kedua, Desa Wisata Berkembang, yang mulai dilirik untuk dikembangkan dan sudah dapat menerima kunjungan. Ketiga, Desa Wisata Maju, di mana masyarakat sudah sadar wisata, mampu mengelola usaha pariwisata, dan memanfaatkan dana desa. Keempat, Desa Wisata

Mandiri, yang sudah memiliki inovasi pariwisata, sarana-prasarana berstandar, pengelolaan kolaboratif berbasis pentahelix, dan destinasi yang diakui secara internasional.

2. Pengembangan Wisata desa

Menurut Antara dan Arida (2015), mengembangkan suatu desa menjadi desa wisata harus menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi desa yang dimiliki (alam, budaya, buatan manusia) yang kelak menarik dilihat dan dikunjungi oleh wisatawan yang memang memiliki keunikan tidak ada duanya di tempat lain, menarik dikemas menjadi paket wisata dan ditawarkan kepada wisatawan, baik melalui sebuah brosur yang ditawarkan kepada biro perjalanan, maupun dipromosikan melalui media on-line yang dikenal dengan website. Saat ini pengembangan desa wisata masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Persoalan pertama, karena belum adanya kriteria desa wisata yang bersifat standard yang bisa dijadikan acuan manakala melakukan pemetaan terhadap desa-desa wisata. Sehingga pengembangan sebuah desa cenderung bersifat duplikasi, yakni mengacu kepada desa wisata yang telah ada sebelumnya, tidak mengangkat keunikan lokal.

Persoalan kedua mengenai belum adanya model pengembangan desa wisata yang dapat berfungsi sebagai cetak biru (blue print), khususnya dalam hal pengembangan kelembagaan lokal, yaitu pengelola desa wisata, tentunya tidak sederhana, butuh proses yang lama untuk bisa terwujud. Pengaruh pengelolaan desa wisata dalam menjamin kesuksesan pengembangan desa wisata memang teramat vital. Dimana absennya dua hal tersebut, membuat pengembangan desa wisata menjadi tersendat dan terkesan berjalan ala kadarnya (Arida dan Pujon, 2017). Menurut Hausler (2005:1) terdapat tiga unsur penting CBT yaitu keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen dan pengembangan pariwisata, pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemberdayaan politik (capacity building) masyarakat lokal yang bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai pengambil keputusan (Wiwin, 2018) Di Indonesia CBT diterapkan antara lain dalam pengembangan daya tarik wisata alam maupun budaya. Masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri. Masyarakat merupakan pelaku langsung kegiatan pariwisata dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan budaya sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola.

3. Identifikasi Potensi dan Daya Tarik Masyarakat

Potensi wisata dapat diidentifikasi melalui empat elemen utama: atraksi, fasilitas, aksesibilitas, dan layanan pendukung (Amerta, 2019). Atraksi menarik wisatawan, fasilitas dan akses mempermudah kunjungan, sementara layanan pendukung seperti promosi dan infrastruktur dasar menunjang kenyamanan wisatawan. Untuk menganalisis potensi tersebut, digunakan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam strategi pengembangan (Habita, 2019).

Menurut UU No. 9 Tahun 1990, daya tarik wisata meliputi alam, budaya, buatan manusia, dan minat khusus. Daya tarik ini bisa berupa objek wisata dengan latar pemandangan alam (Antara & Arida, 2015). Yoeti (1996) menyatakan bahwa destinasi wisata idealnya memiliki something to see (daya tarik), something to do (aktivitas wisata), dan something to buy (tempat belanja oleh-oleh dan fasilitas penunjang).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Critical Literature Review untuk menganalisis konsep Pengembangan Kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata desa yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan mensintesis temuan dari berbagai literatur yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas (Grant & Booth, 2009). Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, yang berfokus pada kesenjangan antara potensi dan realitas pengembangan desa wisata di Indonesia. Selanjutnya, pencarian dan seleksi literatur dilakukan dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal akademis, buku, laporan lembaga (UNDP, OECD, Bank Dunia), dan dokumen kebijakan pemerintah, dengan kriteria inklusi termasuk literatur yang membahas Pengembangan Kapasitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan desa wisata, serta publikasi yang diterbitkan antara tahun 2000-2024 untuk memastikan relevansi dengan konteks saat ini. Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kontradiksi, dengan menggunakan kerangka kerja teoretis seperti konsep Pengembangan Kapasitas dari UNDP (2008) dan OECD (2006). Metode ini memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan aplikatif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesenjangan antara Potensi dan Realitas Pengembangan Desa Wisata di Indonesia

Kesenjangan antara Potensi dan Realitas Pengembangan Desa Wisata di Indonesia Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia memiliki 10.807 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah, mencerminkan potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara kuantitas dan kualitas. Banyak desa wisata yang belum siap secara manajerial maupun kelembagaan. Pendekatan pembangunan yang masih bersifat top down menjadikan masyarakat desa cenderung pasif, padahal mereka seharusnya menjadi subjek utama dalam pengembangan destinasi wisata berbasis lokal. Berbagai program nasional seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) memang memberikan dorongan, tetapi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan berupa kapasitas masyarakat yang lemah.

Ketidaksiapan ini dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang menjadi Banyak desa hanya mengejar status sebagai “desa wisata” tanpa dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan struktur pengelolaan. Salah satu faktor utamanya yaitu Kurangnya fasilitas pendukung, masih minimnya fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan desa wisata (Chaerunissa, 2020). Selain itu, Ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi turut memperlebar jurang antara desa wisata yang berkembang dengan desa yang tertinggal apalagi di era digital di mana promosi dan jejaring online sangat menentukan keberhasilan sebuah destinasi.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yaitu dimana semakin memperkuat kesenjangan yang ada. Dalam banyak kasus masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai pengambil keputusan atau pemilik proses pembangunan. Padahal prinsip utama dalam pengembangan desa wisata adalah pemberdayaan dan kepemilikan komunitas. Tanpa pendekatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas individu, kelembagaan, dan sistem lokal sebagaimana ditekankan dalam kerangka *Capacity Development* oleh UNDP (2008) desa wisata hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang gagal menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat desa.

2. Urgensi Pendekatan Capacity Development sebagai Solusi Transformasional

Pendekatan *Capacity Development* yang dikembangkan oleh UNDP (2008) menekankan pentingnya pembangunan kapasitas dalam tiga ranah utama: capacity to act, to lead, and to relate. Ketiga ranah ini merepresentasikan kemampuan individu dan komunitas untuk

bertindak secara mandiri, memimpin proses perubahan di lingkungannya, dan menjalin relasi kolaboratif dengan pemangku kepentingan lain. Dalam konteks desa wisata, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena keberhasilan pengembangan tidak hanya bergantung pada infrastruktur atau modal ekonomi tetapi lebih pada kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola, memimpin, dan mempertahankan destinasi secara berkelanjutan.

Tanpa pendekatan berbasis penguatan kapasitas, pengembangan desa wisata berisiko menjadi proyek jangka pendek yang terputus dari konteks sosial budaya lokal. Banyak inisiatif wisata gagal karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk memimpin atau berpartisipasi secara sejajar dengan aktor eksternal seperti pemerintah atau pelaku industri pariwisata. Padahal ketika masyarakat memiliki *capacity to lead*, mereka mampu mengarahkan pengembangan wisata sesuai dengan kebutuhan dan identitas lokal. Untuk mendapatkan dukungan penduduk, maka sejak awal perencanaan desa wisata harus diatur agar sebagian besar penduduk harus ikut terlibat dalam proyek ini (Susyanti & Latianingsih, 2015). Demikian pula, *capacity to relate* diperlukan untuk membangun jaringan, membentuk kemitraan, dan memperluas akses pasar yang menjadi kunci dalam industri pariwisata modern.

Desa wisata merupakan salah satu pariwisata alternatif yang dapat dikembangkan pada era sekarang ini. Desa wisata menjadi relevan dengan terjadinya pergeseran model pembangunan pariwisata yang menitikberatkan pada aspek sosial, ekologis, dan pariwisata berbasis masyarakat (Bagus Sanjaya, 2018). Oleh karena itu, *capacity to act* menjadi fondasi utama agar masyarakat dapat mengambil peran aktif, bukan sekadar menjadi objek pembangunan. Pendekatan *Capacity Development* mendorong transformasi dari dalam menjadikan masyarakat bukan hanya pelaksana teknis tetapi pemilik visi dan arah pembangunan. Dengan penguatan kapasitas ini, desa wisata memiliki peluang untuk tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tengah ekosistem pariwisata yang semakin kompleks.

3. Analisis Dimensi Capacity Development Menurut OECD

Menurut kerangka dari OECD, *Capacity Development* mencakup empat dimensi utama yang saling terkait yaitu kapasitas manusia, kapasitas kelembagaan, kapasitas sosial, dan enabling environment (lingkungan pendukung). Keempat dimensi ini tidak dapat berdiri sendiri, karena pembangunan kapasitas yang efektif harus memperkuat aktor individu dan komunitas, institusi, serta sistem yang menopang keberlanjutan transformasi sosial. Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang

berkaitan langsung dengan jasa pelayanan dan membutuhkan kerja sama langsung dengan pemerintah, swasta serta masyarakat (Rohmah & Harianto, 2023).

Namun pada kenyataannya, banyak desa wisata di Indonesia masih berfokus pada dimensi fisik atau infrastruktur semata, seperti membangun spot foto, jalan akses, atau tempat istirahat, tanpa diimbangi dengan penguatan kelembagaan dan sosial. Kapasitas organisasi lokal, seperti *Pokdarwis* (Kelompok Sadar Wisata), sering kali lemah secara struktur maupun fungsi. Ketiadaan pelatihan manajerial, kepemimpinan komunitas, dan proses regenerasi dalam organisasi membuat kelembagaan tersebut tidak mampu menjadi penggerak utama pembangunan wisata yang berkelanjutan. Hal ini diperparah dengan lemahnya relasi sosial antarwarga dan minimnya jejaring dengan pihak eksternal seperti pemerintah, pelaku industri, atau lembaga pendamping.

Dimensi kapasitas sosial dan kelembagaan sangat krusial karena berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan. Ketika masyarakat memiliki ikatan sosial yang kuat, kepercayaan timbal balik, dan kemampuan berorganisasi, maka proses pengambilan keputusan akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Begitu pula *enabling environment* yang mencakup kebijakan yang mendukung, kepastian hukum, dan akses terhadap sumber daya perlu dibangun secara kontekstual agar inisiatif desa wisata dapat bertumbuh. Tanpa keempat dimensi ini berjalan secara sinergis, pengembangan desa wisata hanya akan menjadi proyek sesaat yang tidak berdampak pada perubahan struktural jangka panjang.

4. Pentingnya Teori Pemberdayaan dalam Menyokong Capacity Development

Teori pemberdayaan, seperti yang dikemukakan oleh Scheyvens (1999) dan Arnstein (1969), memberikan kerangka kritis dalam memahami bagaimana masyarakat dapat bertransformasi dari objek menjadi subjek pembangunan. Scheyvens menekankan empat dimensi pemberdayaan ekonomi, sosial, psikologis, dan politik sementara Arnstein melalui *Ladder of Participation* menyoroti pentingnya partisipasi bermakna dalam bentuk power sharing dan kendali atas keputusan. Gelbman and Timothy (2011) menyatakan bahwa elemen lingkungan fisik, sosial, dan budaya perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan pariwisata agar bisa berkelanjutan (Darmayanti & Oka, 2020). Dalam konteks pengembangan desa wisata teori-teori ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat diberi ruang untuk berpendapat serta menentukan arah pembangunan dan merasa memiliki proses tersebut.

Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan desa wisata di Indonesia masih berfokus pada dimensi ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan dana usaha, atau pembangunan infrastruktur wisata. Pendekatan ini sering kali bersifat dangkal dan instrumental karena tidak disertai upaya untuk membangun *agency* atau daya kontrol masyarakat atas aset dan keputusan. Partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat simbolik, seperti keterlibatan dalam kegiatan tanpa kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan. Ketika warga tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan maka yang terjadi bukanlah pemberdayaan sejati melainkan ketergantungan baru terhadap pihak luar.

Dalam kerangka *capacity development*, pemberdayaan yang bersifat psikologis (rasa percaya diri), sosial (kohesi dan solidaritas), serta politik (akses terhadap kekuasaan dan kontrol sumber daya) adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa masyarakat desa benar-benar menjadi pelaku utama pembangunan. Tanpa keberdayaan struktural ini, program pengembangan desa wisata hanya akan melahirkan ketimpangan baru: segelintir pihak memperoleh manfaat, sementara mayoritas tetap berada di pinggiran proses. Oleh karena itu, integrasi teori pemberdayaan ke dalam desain kebijakan dan program sangat penting untuk mendorong transformasi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

5. Kritik terhadap Model Pengembangan Desa Wisata yang Cenderung Seragam

Salah satu kritik utama terhadap pengembangan desa wisata di Indonesia adalah kecenderungannya yang seragam dan minim diferensiasi lokal. Banyak desa wisata tumbuh dengan pendekatan replikasi tanpa adaptasi kontekstual mengadopsi model dari desa lain tanpa mempertimbangkan kekhasan sosial, budaya, dan lingkungan yang dimiliki masing-masing desa. Hal ini terjadi karena tidak adanya standar atau blue print nasional yang memberi panduan fleksibel namun terarah bagi pengembangan berbasis potensi lokal. Akibatnya, desa wisata menjadi produk massal yang kehilangan daya tarik karena tidak menawarkan keunikan yang otentik bagi wisatawan.

Dalam konteks ini, teori Community-Based Tourism (CBT) menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menggali dan menonjolkan identitas lokal sebagai fondasi pengembangan wisata. Menurut Nurhidayati (2007) CBT merupakan konsep pembangunan wisata yang memperhatikan masyarakat, konservasi lingkungan, dan budaya (Azzahra et al., 2023). CBT menempatkan komunitas sebagai pusat dari proses perencanaan hingga pengelolaan destinasi. Jika teori ini dijalankan secara konsekuen maka tiap desa akan

membangun narasi dan pengalaman wisata yang khas berbasis budaya, tradisi, atau lanskap alam yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun realitasnya, banyak program pembangunan desa wisata justru cenderung memaksakan format seragam seperti taman selfie, glamping, atau pasar kuliner tanpa refleksi mendalam atas nilai-nilai lokal.

Pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) seharusnya menjadi alat strategis untuk memetakan potensi dan tantangan spesifik yang dimiliki setiap desa. Melalui analisis ini, desa bisa menentukan arah pengembangan yang relevan dan berkelanjutan, tanpa terjebak dalam model industri pariwisata mainstream. Nilai autentisitas lokal bukan hanya aset budaya, tetapi juga menjadi pembeda yang memiliki nilai jual tinggi di tengah kejenuhan wisata berbasis kemasan instan. Oleh karena itu, kritik terhadap model seragam ini menjadi penting untuk mendorong pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berpihak pada karakter unik setiap komunitas desa

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut Statistik Potensi Desa Indonesia 2024, terdapat 10.807 desa wisata di seluruh Indonesia. Hal ini memiliki banyak peluang untuk mengembangkan wisata yang berbasis komunitas dan ramah lingkungan. Namun, banyak kota wisata yang masih menghadapi masalah seperti sumber daya manusia yang terbatas, manajemen profesional yang kurang efektif, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, Desa Wisata Dieng mengalami kesulitan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari peningkatan jumlah pengunjung, sementara Desa Pentingsari berhasil mengintegrasikan potensi alam dan budayanya melalui partisipasi aktif masyarakat. Seperti yang ditekankan oleh UNDP dan OECD, pendekatan pengembangan kapasitas merupakan solusi penting untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memperkuat kapasitas individu, kelembagaan, dan sosial masyarakat. Pengembangan kapasitas tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif, penguatan kelembagaan lokal, dan penguatan institusi lokal. Pengembangan kapasitas tidak hanya mencakup pelatihan teknik, tetapi juga meningkatkan kekuatan masyarakat melalui partisipasi aktif, penguatan institusi lokal, dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berpengaruh. Selain itu, Community-Based Tourism (CBT) dan analisis SWOT diperlukan agar pengembangan desa wisata didasarkan pada keunikan lokal dan bukan hanya mereplikasi model yang seragam. Dengan pendekatan holistik ini, desa wisata dapat mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan

tetap mempertahankan identitas budaya sebagai daya tarik utama.

Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan, pengembangan kapasitas masyarakat perlu diarahkan secara menyeluruh melalui pendekatan yang terstruktur dan kontekstual. Fokus utama meliputi penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan intensif di bidang manajemen destinasi, kewirausahaan berbasis budaya, pemasaran digital, serta layanan pariwisata, dengan melibatkan peran aktif akademisi dan praktisi. Selain itu, diperlukan pembentukan kelembagaan lokal yang profesional, khususnya Pokdarwis, dengan struktur organisasi yang fungsional, transparansi pengelolaan keuangan, dan dukungan regulasi desa yang inklusif dan partisipatif. Penguatan kapasitas sosial masyarakat desa juga menjadi pilar penting, yang dapat dilakukan dengan membangun jejaring kolaboratif lintas sektor (pentahelix), serta memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda sebagai aktor utama dalam pengembangan desa wisata. Untuk menghindari homogenisasi antar destinasi, pengembangan produk wisata perlu berbasis potensi lokal melalui analisis SWOT, dan dirancang secara naratif (storytelling) agar mencerminkan identitas budaya setempat.

Dukungan kebijakan juga menjadi elemen strategis yang tidak dapat terpisahkan, mulai dari pemberian insentif kepada pelaku UMKM pariwisata, penyediaan helpdesk di tingkat kabupaten, hingga sistem evaluasi dampak secara berkala. Sebagai langkah awal, pendekatan berbasis aksi partisipatif (Participatory Learning and Action/PLA) dapat diterapkan melalui proyek percontohan di beberapa desa wisata untuk memastikan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pendekatan integratif ini, desa wisata diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Austin, J. E. (2003). *Strategic Collaboration Between Nonprofits and Business*. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 32(3), 469-485.
- Azzahra, N. A., Setiyono, B., & Manar, D. G. (2023). *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Kandri*,

- Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 118–139.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38149>
- Bagus Sanjaya, R. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05, 91.
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05>
- Brown, D., Filer, C., & Milne, S. (2000). *Capacity Building and the Development of Civil Society in the Pacific: An Overview of the Issues*. Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific.
- Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. *Tourism Management*, 29(4), 609-623. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chaerunissa. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Darmayanti, P. W., & Oka, I. M. D. (2020). Implikasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Bagi Masyarakat Di Desa Bongan. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(2), 142–150. <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i2.167>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91-108.
<https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Korten, D. C. (1980). Community organization and rural development. *Public Administration Review*, 40(5), 480-511. <https://doi.org/10.2307/3110204>
- Krisnawati, I. (2021). Program pengembangan desa wisata sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211–221.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/download/1974/1016>
- Morgan, P. (2006). *The Concept of Capacity Development*. European Centre for Development Policy Management (ECDPM).

- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2006). *The Challenge of Capacity Development: Working Towards Good Practice*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Rohmah, D. F., & Harianto, S. (2023). Analisis Pemberdayaan Sumber Daya Desa sebagai Desa Pariwisata di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 134–121. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i2.7845>
- Setijaningrum, E., Mardiyanta, A., Wardiyanto, B., & Samad, S. A. (2025). When Silence Speaks: Public Service Innovation, Village Authority, and the Negotiation of Traditional Justice in Rural Indonesia's Youth Protection System. *Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/socsci14010022>
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2015). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *EPIGRAM (e-Journal)*, 11(1), 65–70. <https://doi.org/10.32722/epi.v11i1.666>
- UNDP. (2008). *Capacity Development: A UNDP Primer*. United Nations Development Programme.
- Wardiyanto, B., Setijaningrum, E., Samad, S., & Kandar, A. H. (2025). Mending the mismatch of minds and mandates: reimagining competency-centric public service delivery in Bojonegoro Regency, Indonesia. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442538>
- World Bank. (2005). *Capacity Building in Africa: An Overview*. World Bank Group